

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai *Collaborative Governance* Dalam Manajemen Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses tata kelola kolaboratif lintas sektor yang berjalan belum sepenuhnya optimal dan belum efektif secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan masih terdapat hambatan struktural, kultural, dan manajerial pada beberapa indikator proses kolaborasi yang belum terpenuhi secara seimbang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Interaction*) : Komunikasi yang terbangun masih mengalami asimetri ruang komunikasi dan ketimpangan posisi (*power balance*) antara aktor makro birokrasi dan mikro (*grassroots*). Pertemuan berkala yang inklusif belum terjadwal secara rutin, di mana forum yang ada cenderung bersifat reaktif menjelang musim penghujan. Struktur formal yang kaku dan kental dengan hierarki paternalistik membuat masyarakat bawah (Destana dan RT) bersikap pasif-akomodatif dan sungkan dalam menyampaikan aspirasi lokalnya.
2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*) : Terjadi dikotomi dalam pembangunan kepercayaan. Pada dimensi taktis-hidrologis, kepercayaan terbangun sangat kuat melalui transparansi diseminasi data Tinggi Muka Air (TMA) secara *real-time* via WhatsApp. Namun pada dimensi manajerial, kepercayaan mengalami degradasi akibat adanya sekat birokrasi yang

menutup akses informasi rincian nominal anggaran kebencanaan dan dana CSR di tingkat tapak, sehingga menimbulkan prasangka negatif di masyarakat terhadap relawan lapangan.

3. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to the Process*) : Komitmen yang berjalan di Kabupaten Bojonegoro masih bersifat fluktuatif atau "Komitmen Musiman". Tensi keterlibatan dan mobilisasi sumber daya dari aktor luar (swasta dan dinas teknis) melonjak drastis hanya pada saat fase tanggap darurat, namun menurun drastis pada fase pra-bencana (musim kemarau). Sebaliknya, komitmen tertinggi dan paling konsisten ditunjukkan secara mandiri oleh komunitas lokal (Destana) yang bertaruh nyawa di lapangan tanpa kepastian dana operasional yang jelas.
4. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*) : Meskipun seluruh aktor telah mencapai kesepahaman konseptual bahwa banjir Ledok Wetan merupakan masalah bersama, pemahaman ini belum dilembagakan dalam dokumen formal. Ketiadaan *masterplan* khusus dan Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas sektor per fase bencana memicu terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) bantuan di lapangan serta kebingungan operasional pada menit-menit awal air naik (*golden hours*). Kondisi ini juga melestarikan ketergantungan absolut warga yang memosisikan diri sebagai objek pasif, bukan subjek mitigasi mandiri.
5. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*) : Di tengah kegagalan pembebasan banjir secara makro akibat kendala geomorfologi sungai, jaringan kolaborasi ini berhasil menelurkan *small wins* (kemenangan kecil)

yang strategis. Capaian tersebut berupa kelembagaan Destana Ledok Wetan yang mandiri dan terlatih, serta suksesnya pembuatan peta jalur evakuasi dan pemasangan plang marka titik aman banjir yang didanai oleh CSR swasta, disinkronkan oleh BPBD, dan dipasang secara gotong royong oleh masyarakat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun maupun dapat dijadikan masukan serta pertimbangan. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

- 1) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama BPBD perlu segera merumuskan regulasi formal berupa Surat Keputusan (SK) Bersama atau Peraturan Bupati yang melegalkan tata peran unsur Penta-helix. Regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum, standardisasi alokasi anggaran operasional bagi relawan basis (Destana Ledok Wetan), serta pembagian kerja yang rigid per fase bencana agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi di lapangan.
- 2) Mengubah pola koordinasi yang reaktif menjadi forum dialog berkala (misalnya forum tiga bulanan) di luar musim penghujan. Format pertemuan harus didesain lebih cair dan inklusif demi mengikis sekat psikologis birokrasi, sehingga komunitas di tingkat tapak seperti

pengurus RT dan relawan dapat menyampaikan kearifan lokal secara setara tanpa rasa sungkan.

- 3) BPBD dan Dinas Kominfo perlu meluncurkan platform digital terpadu yang dapat diakses publik. Di dalam platform tersebut, pemanfaatan dana APBD kebencanaan, kontribusi dana CSR dari pihak swasta, hingga distribusi bantuan logistik dilaporkan secara *real-time* untuk meminimalisasi prasangka negatif di tingkat masyarakat.
- 4) BPBD perlu memperluas program edukasi literasi bencana yang berorientasi jangka panjang di Kelurahan Ledok Wetan. Masyarakat tidak boleh lagi diposisikan sebagai objek pasif penerima bantuan, melainkan dibentuk menjadi subjek mitigasi aktif yang memiliki kapasitas evakuasi mandiri (terutama pada menit-menit awal krisis sebelum petugas kabupaten tiba di lokasi).

2. Bagi peneliti selanjutnya :

- 1) Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokus penelitian tidak hanya pada satu kelurahan, melainkan melakukan studi komparatif antara wilayah bantaran sungai Bengawan Solo yang memiliki karakteristik urban (seperti Kelurahan Ledok Wetan) dengan wilayah pedesaan/rural di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini penting untuk melihat efektivitas model *Collaborative Governance* dalam konteks sosiologis masyarakat yang berbeda.
- 2) Mengingat penelitian ini menemukan adanya asimetri ruang komunikasi dan ketimpangan posisi antara aktor makro dan mikro,

peneliti selanjutnya diharapkan dapat membedah lebih dalam mengenai dinamika kekuasaan (*power dynamics*) dan resolusi konflik antaraktor menggunakan variasi teori kolaborasi yang lebih spesifik, seperti model Emerson atau Purdy.

- 3) Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi longitudinal (jangka panjang) untuk menguji konsistensi komitmen para aktor (khususnya sektor swasta dan dinas teknis) di luar masa tanggap darurat, atau mengevaluasi dampak jangka panjang dari capaian-capaian kecil (*small wins*) yang telah dihasilkan oleh Destana Ledok Wetan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Laili, N. (2021). *Manajemen Risiko Bencana Banjir Berbasis Komunitas*. Penerbit BCS.
- Nugroho, E., et al. (2023). *Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana Melalui Pengembangan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)* (Bookchapter Kesehatan Masyarakat). Universitas Negeri Semarang, (3), 92–113.
- Sayers, Paul. (2013). *Flood Risk Management: A Strategic Approach*. Asian Development Bank.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Peraturan-Peraturan :

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana

Website :

- Satu Data Bojonegoro. <https://data.bojonegorokab.go.id/>

Jurnal-Jurnal :

- Albano, R., Mancusi, L., Sole, A., & Adamowski, J. (2015). Collaborative strategies for sustainable EU flood risk management: FOSS and geospatial tools-challenges and opportunities for operative risk analysis. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 4(4), 2704–2727. <https://doi.org/10.3390/ijgi4042704>
- Amriampa, A., Ibrahim, A., Hasniati, H., Abdullah, T., & Iskandar, D. (2024). Effectiveness of Disaster Management Programs: a Collaborative Governance

- Analysis of Flood Response in North Kalimantan Province. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 4(3), 193–200. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v4i3.718>
- Anggita, A. S., Asta, A. S., & Hertati, D. (2020). *PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MANAJEMEN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN GRESIK*. 2(5).
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: models, experiences, and challenges. *Public Management Review*, 23(11), 1581–1589. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777>
- Bryson, J. m, Crosby. Barbara, C., & Stone, M. M. (2006). *The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature*.
- Chaerani, D., Rodhiya Robbi, M., Hertini, E., Rusyaman, E., & Paulus, E. (2020). Determining Flood Protection Strategy with Uncertain Parameter Using Adjustable Robust Counterpart Methodology. In *Januari* (Vol. 21, Number 1).
- Driessen, P. P. J., Hegger, D. L. T., Kundzewicz, Z. W., van Rijswijk, H. F. M. W., Crabbé, A., Larrue, C., Matczak, P., Pettersson, M., Priest, S., Suykens, C., Raadgever, G. T., & Wiering, M. (2018). Governance strategies for improving flood resilience in the face of climate change. *Water (Switzerland)*, 10(11). <https://doi.org/10.3390/w10111595>
- Eka, M. S., & Al. Hudzaifah Fatih. (2019). *HUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU DENGAN KESIAPSIAGAAN PERAWAT PUSKESMAS DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG*. 15(1), 6.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Firdaus, P., & Koestoer, R. H. (2022a). Future Flood Management and Control Policies: A Comparative Study of Europe and Indonesia. *Indonesian Journal of Earth Sciences*, 2(2), 96–109. <https://doi.org/10.52562/injoes.v2i2.379>
- Firdaus, P., & Koestoer, R. H. (2022b). Future Flood Management and Control Policies: A Comparative Study of Europe and Indonesia. *Indonesian Journal of Earth Sciences*, 2(2), 96–109. <https://doi.org/10.52562/injoes.v2i2.379>

- Hari, W., Widodo, S., Hammidah Imadudinna, A., & Sasongko, I. (2022). *Study of Flood Disaster Risk Delta in Bojonegoro Regency*.
- Haris, A., Tahir, S., Nurjaya, M., & Baharuddin. Tawakkal. (2023). Analisis Bibliometrik Tentang Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan: Inisisasi Kebijakan Untuk Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 314–324.
- Herawati, N., Rido, A., Prayogi, Y., Haksama Setya, & Zainal, M. F. (2022). *Mitigasi Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Bojonegoro*.
- Hidayati, B., Wardana, F. C., Tiarantika, R., Setiawan, E., Suwanan, A. F., & Riyanto, F. D. (2023). Where does flood resilience grow? the flood environmental management and socioeconomic configurations of the smart environment model. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1248(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1248/1/012023>
- Irawan, H. U., Nurdin, N., & Arsyad, R. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6).
- Kasiami, S., Wulandari, S., & Febriadi, E. (2024). Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam Membantu Pengembangan Petani Hutan di Kawasan Pertamina EP Cepu Zona 12. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3).
- Merz, B., Hall, J., Disse, M., & Schumann, A. (2010). Natural Hazards and Earth System Sciences Fluvial flood risk management in a changing world. In *Hazards Earth Syst. Sci* (Vol. 10). www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/10/509/2010/
- Mulyadi, D., & Rinaldy Maulana, R. (2021). *Government Collaboration Model for Disaster Management Policy in West Bandung Regency*.
- Nisa, F. (2014). *MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR, PUTING BELIUNG, DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN JOMBANG*. (2), 103–220.
- Norzistya, A. D., & Handayani, W. (2020). Modal sosial dalam ketahanan komunitas terhadap bencana banjir di Kelurahan Kemijen dan Krobokan, Kota Semarang. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 15(2), 206. <https://doi.org/10.20961/region.v15i2.29694>
- Novan, A. N., & Sih, J. S. (2014). Perubahan Kesiapsiagaan Masyarakat DAS Beringin Kota Semarang dalam Menghadapi Ancaman Banjir Bandang. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 2(3), 231–244.

- Nurulhuda, A. N., & Sofyan Cholid. (2026). Pengaturan Kelembagaan dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif terhadap Penanggulangan Bencana Banjir. *Bappenas Working Papers*, 9(2), 356–381. <https://doi.org/10.47266/bwp.v9i2.491>
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum015>
- Rahardjo, P. P. (2023). *Kajian Pemetaan Resiko Banjir Kabupaten Bojonegoro Dengan Menggunakan Model SIMOBA* (Vol. 1, Number 2).
- Rahmawaty, M. A., & Hasan, A. F. (2023). Mapping The Location of Flood Shelters in Demak Regency using The Spatial Multi Criteria Evaluation Method. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1264(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1264/1/012010>
- Wijaya, C., Dian, V., & Sari, P. (2019). *Encouraging Collaborative Governance in Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Management in Indonesia*. <http://ojs.unm.ac.id/iap>
- Witting, A., Brandenstein, F., & Kochskämper, E. (2021). Evaluating learning spaces in flood risk management in Germany: Lessons for governance research. *Journal of Flood Risk Management*, 14(2). <https://doi.org/10.1111/jfr3.12682>